

# **CIVIL SOCIETY DI BAWAH BAYANG-BAYANG SINDROM PRAETORIANISME**

**Oleh Triyono Lukmantoro**

---

**Triyono Lukmantoro**, lulus dari Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang pada bulan Oktober 1997. Semenjak bulan Februari 1998, tercatat sebagai staf pengajar pada almamaternya.

---

## **Ringkasan**

Kemunculan *civil society*, tampaknya, hanya melahirkan sebuah pesimisme. Ini disebabkan bahwa sudah sekian lama pola-pola kekerasan yang dijalankan negara telah merasuki *lifeworld* masyarakat. Kesemua ini terjadi, serta bahkan menjadi sebuah imperatif yang tidak dapat ditolak, karena peranan militer yang sedemikian besar dalam mendominasi lembaga negara. Posisi serta peran militer yang sebenarnya hanya menjadi “pengawal”, namun ironisnya justru berbalik menjadi pihak yang menduduki “tahta kekuasaan” yang dikawalnya, pada puncaknya, hanya melahirkan sekumpulan bibit penyakit (sindrom) *praetorianisme*.

*Keywords:* Civil society, negara, militer, kekerasan.

## **A. Pendahuluan**

Terdapat sebuah perhitungan politik yang dijadikan parameter baku bahwa penguatan *civil society* selalu diidentikkan dengan semakin lemahnya kekuasaan negara. Namun, benarkah cara kalkulasi politis yang demikian itu? Boleh jadi cara berpikir tersebut muncul akibat adanya dikotomi yang seakan-akan saling bermusuhan antara pihak negara (*state*) dengan masyarakat sipil, atau yang sekarang lebih populer dengan sebutan “masyarakat madani” (*civil society*). Memposisikan *state* dengan *civil society* secara diametral hanya akan memproduksi sebuah pola pemahaman bahwa hubungan negara dengan masyarakat saling menyalahkan. Ini sebagai akibat adanya keinginan untuk merealisasikan suatu kontestasi yang mengarah pada *zero sum game*, yakni sebuah pertandingan politik yang harus menghilangkan dengan total pihak yang dianggapnya musuh.

Apabila parameter terwujudnya sebuah *civil society* semacam itu, niscaya sekarang ini pun apa yang disebut sebagai “masyarakat madani” tersebut sudah terbentuk secara menyeluruh. Bukankah pada saat ini negara sedemikian lemahnya dalam mengontrol masyarakat? Atau, kalau diamati secara lebih kritis lagi, bukankah negara juga telah memenuhi tuntutan masyarakat, meskipun tidak dalam lingkup yang mutlak? Kekuatan arus bawah atau *grassroots politics* seakan-akan mendapatkan momentumnya untuk mendobrak kemapanan negara. Tetapi, apakah dengan semakin kokohnya kekuatan massa arus bawah tersebut, seiring dengan itu keberhasilan serta dimunculkannya *civil society* harus ditunjukkan pula dengan rusaknya seluruh tatanan yang telah diciptakan negara?

Sebenarnya, *civil society* yang lahir sebagai aktualisasi dari kekuatan masyarakat yang bebas dari intervensi negara tidak harus diukur secara absolut dengan melakukan praksis-dekonstruktif untuk merusak seluruh tatanan (*orders*) yang telah dikonstruksi oleh negara. Yang lebih urgensif untuk dilakukan setelah melakukan dekonstruksi, tentu saja, adalah mencoba melakukan *rekonstruksi*. Ini dengan alasan bahwa *civil society* tidak mempunyai kongruensi sedikit pun dengan kondisi anomie,

yaitu tidak adanya aturan hukum yang dapat dipercaya lagi oleh masyarakat sehingga masyarakat kehilangan orientasi nilai yang ideal.

Selain itu, *civil society* tidak dapat pula diidentifikasi sebagai keadaan yang serba *chaos*, sehingga muncullah sebuah keadaan yang nihilistik (*anything goes*). Jika paradigma Nietzschean diterapkan dalam penyusunan kekuasaan, maka yang akan terlahir hanyalah kehendak untuk melakukan *annihilation* atau *destroy completely* dari pihak masyarakat terhadap negara. Dan, itu tentu saja, akan berimplikasi lebih buruk lagi dengan pertarungan kekuasaan dalam masyarakat sendiri. Realitas paling suram yang akan terjadi adalah konflik berkepanjangan yang tidak mungkin akan terselesaikan. Jadi, paradigma Nietzschean mempunyai relevansi yang baik jika ditempatkan secara proporsional dalam tahap berpikir untuk secara kontinyu melakukan pembongkaran terhadap semua bentuk ideologisasi yang diciptakan negara.

Kemudian, pertanyaan substansial yang harus dijawab untuk menghindarkan diri dari pola berpikir *zero sum game* adalah: Apakah sebenarnya *civil society* itu? *Civil society* secara kelembagaan (institusional) merupakan pengelompokan dari anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya. Dalam kaitan ini, *civil society* merupakan suatu entitas yang keberadaannya menerobos batas-batas kelas serta memiliki kepastian politik yang cukup tinggi. Ini dimaksudkan agar mampu menjadi kekuatan pengimbang (*balancing force*) dari adanya kecenderungan-kecenderungan intervensionis negara. Serta pada saat yang bersamaan mampu juga untuk melahirkan kekuatan kritis reflektif (*reflective forces*) dalam mencegah atau mengurangi derajat konflik-konflik sebagai akibat dari proses formasi sosial modern. Karena *civil society* mempunyai prasyarat bagi terlahirnya wacana publik, maka inheren di dalamnya juga mengharuskan kehadiran sebuah ruang publik yang bebas atau *a free public sphere* (dalam Hikam, 1996: 84-85).

Gagasan atau terminologi semacam itu juga dikemukakan oleh Ernest Gellner, yang menyatakan bahwa *civil society* merupakan satu rangkaian lembaga-lembaga non-pemerintah yang beragam yang cukup kuat untuk memberikan keseimbangan pada negara. Namun, pada saat yang sama tidak menghalangi negara untuk mengisi peranannya sebagai penjaga perdamaian dan arbitrator antar kepentingan-kepentingan utama. Artinya adalah negara dapat dicegah atau dihalangi untuk melakukan dominasi atau pun mengecilkan keberadaan masyarakat (dalam Hadiwinata, 1999: 7-8). Dengan pemahaman yang demikian ini, maka secara keseluruhan *civil society* merupakan perwujudan dari semakin kokohnya kekuatan serta kedudukan masyarakat dengan negara untuk melakukan berbagai *bargaining* (suatu proses tawar-menawar) yang bersifat saling mengimbangi. Tidak ada tujuan sedikit pun untuk saling melakukan pelenyapan, karena negara masih diakui sebagai sebuah lembaga yang mampu mengatur atau melakukan regulasi terhadap masyarakat dengan baik. Sebaliknya, pihak masyarakat pun dapat melakukan kontrol secara efektif terhadap negara tanpa harus mengalami ketakutan untuk ditindas.

## B. Pembahasan

Justru sekarang yang menjadi problematika yang lebih utama adalah: Mengapa muncul suatu paradigma yang seakan telah menjadi dogma bahwa lahirnya *civil society* harus identik dengan penghancuran terhadap negara; atau menciptakan sebuah *chaos* untuk melakukan praksis yang tidak

lagi sekadar dalam tataran dekonstruktif namun sudah mengarah pada sebuah penciptaan kehendak untuk membongkar negara (sebagai sebuah *kosmos*) beserta seluruh tatanannya secara anihilatif? Fenomena-fenomena ini dapat dilacak dengan melandaskan diri pada berbagai alasan berikut ini, yaitu:

*Pertama*, adalah kehendak yang sedemikian ambisius dari rezim Orde Baru untuk menciptakan sebuah negara kesatuan. Hal ini dapat dilacak, setidaknya, dari berbagai penciptaan *logotechniques* (yaitu berbagai teknik yang dilakukan untuk merealisasikan *logos* yang diyakini kebenarannya secara mutlak), seperti persatuan-dan-kesatuan bangsa dan juga stabilitas. Jadi, “kesatuan” oleh rezim Orde Baru dalam hal ini telah ditempatkan sebagai sebuah Narasi Agung (*Grand Narratives*) yang kebenarannya tidak boleh diganggu gugat sedikit pun. Atau, dalam wacana postmodernisme, kesatuan telah menjadi sebuah suara yang sedemikian berdaulat (*sovereign voice*). Kesatuan merupakan proyek modern yang telah ditempatkan dalam singgasana suci *logosentrisme* yang semua pihak harus tunduk dan menunjukkan kepatuhan terhadapnya. Demikianlah, sehingga yang terbentuklah adalah sebuah formulasi bahwa negara harus menciptakan kesatuan dengan harga yang tidak boleh sedikit pun untuk dilakukan penawaran terhadapnya. Melakukan *bargaining* berarti merupakan upaya pembangkangan dan dikhawatirkan akan mengotori kesucian misi kesatuan yang diciptakan dan dibawa negara.

Namun, harus pula dipahami bahwa ambisi rezim Orde Baru untuk merealisasikan misi suci ini adalah karena ada dorongan-dorongan profetis yang dalam lingkup sejarahnya pernah dikumandangkan oleh Soepomo. Dengan berbagai muslihatnya, rezim Orde Baru menciptakan berbagai perkaitan rumit historis antara masa sekarang (*present time*) dengan masa lalu (*past time*), yaitu kehendak untuk menciptakan negara kesatuan sebagai terjemahan paling vulgar dari negara integralistik yang pernah dirumuskan Soepomo. Jika dilacak secara lebih jernih, maka negara integralistik Soepomo adalah sebuah versi negara gaya Hegelian yang menyatakan bahwa negara merupakan roh obyektif. Hal ini menandakan bahwa sebagai roh obyektif, negara merupakan roh atau makna yang sebenarnya yang terkandung dalam segala macam pikiran, hasrat dan kehendak masing-masing orang (yaitu roh subyektif). Dengan cara berpikir semacam ini, Hegel mempunyai pemikiran bahwa sesungguhnya rakyat tidak mengetahui dengan baik apa yang dikehendakinya. Jadi, yang paling mengetahui dari kehendak rakyat adalah negara, sebab negara secara “obyektif” mengungkapkan apa yang dalam rakyat hanya ada secara “subyektif” (Magnis-Suseno, 1993: 98-101). Kemudian, dengan semangat feodalismenya yang spesifik Jawa, Soepomo menggelindingkan sebuah format yang lebih khas, yaitu dalam ungkapan *Manunggaling Kawula-Gusti* (bersatunya hamba-dengan-Tuan).

*Kedua*, untuk menjalankan konsep tentang tidak adanya perbedaan atau suatu upaya penyatuan antara penguasa dan rakyat, maka rezim Orde Baru membentuk dirinya sebagai negara organis yang mempunyai kemandirian tinggi tanpa pernah mendapatkan pengaruh sekecil apapun dari masyarakat. Memang, secara teoritis, negara organis melakukan inisiatif sendiri dalam merumuskan berbagai kebijakannya untuk kepentingan umum (Budiman, 1982: 7). Namun, pada pelaksanaannya yang muncul adalah sebetulnya rezim totaliter yang sedemikian otonom, yang justru pada puncaknya hanya melahirkan sebuah lembaga kekuasaan yang sama sekali terasing (*alienated*) dari masyarakatnya. Sedangkan untuk memberikan kesan bahwa rezim Orde Baru bernuansakan demokratis, maka strategi yang ditempuhnya adalah dengan jalan korporatisme. Dalam strategi semacam ini, negara secara aktif melakukan konsultasi dengan wakil-wakil masyarakat untuk mengedepankan pendapat-pendapat mereka. Hanya saja negara mempunyai kewenangan yang mutlak untuk menentukan

kelompok-kelompok mana dari masyarakat yang boleh mengirimkan wakil-wakilnya serta berapa jumlahnya (Budiman, 1982: 7).

Dengan metode metamorfosis organis dan korporatis yang canggih inilah, rezim Orde Baru mampu menciptakan pendamaian yang semu antara kekuasaan tertinggi dalam wujud *strong state* yang sedemikian totaliter dengan *civil society* yang secara sistematis telah diciptakan sebagai pihak yang *powerless*. Paradigma yang mencoba melihat kekuasaan secara terpisah dalam bentuk relasi kuasa yang serba konfliktual antara *state-civil society* dilarang sama sekali. Rezim Orde Baru mencoba untuk menyatukan dualisme kekuasaan yang sesungguhnya secara nyata bertarung tersebut dengan berbagai macam simbolisasi. Misalnya saja dalam wujud keinginan untuk menciptakan identitas dalam rumus yang dikenal sebagai kebudayaan nasional.

Pluralitas masyarakat yang dalam konkretnya terekam dalam diversitas religi, kelas, gender, serta ras dimasukkan dalam sebuah gambaran yang tanpa melibatkan pertarungan kepentingan, baik dalam tataran konflik horisontal (kultural) maupun konflik vertikal (ekonomi-politik). Harmonisasi yang dalam pelaksanaannya mengandalkan perilaku represif sengaja dipaksakan dalam sebuah slogan yang disebut sebagai stabilitas nasional untuk dapat merengkuh segala bentuk kemajemukan konfliktual dalam masyarakat. Dalam hal inilah tampak dengan jelas bahwa konsep stabilitas nasional yang direkatkan dengan identitas (budaya nasional) sengaja diaplikasikan secara *sophisticated* untuk menutup-nutupi berbagai potensi pertarungan sebagai akibat dari adanya keanekaragaman budaya.

*Ketiga*, dalam pencapaian tujuan penyatuan antara negara-masyarakat, penguasa-hamba, serta gagasan identitas nasional yang mengandaikan tidak adanya pluralitas kultural; maka ditempatkanlah militerisme sebagai *episteme* dalam kekuasaan negara. *Episteme*, sebagaimana pernah dikemukakan Foucault, merupakan sistem pemikiran yang mendasari lahirnya teori serta ilmu pengetahuan pada waktu tertentu (Bertens, 1985: 483). Hanya saja, karena sistem berpikir yang serba paradigmatis ini diaplikasikan sedemikian ketat dalam kekuasaan negara, maka mempunyai berbagai implikasi yang lebih mendalam. Sebab, *episteme* merupakan cara dari suatu sistem pemikiran dan pembentukan gagasan yang berarti merupakan metode untuk melihat fenomena yang sedang berkembang dalam masyarakat. Melalui cara melihat, menilai serta men-*judgement* inilah muncul juga cara membicarakan yang terbentuk dalam apa yang disebut sebagai *discourse* (wacana). Titik kulminasinya adalah pada segi tindakan praktis di mana militerisme sebagai *episteme* dijadikan *blueprint* rigid yang mempunyai kekuatan ideologis. Sehingga, rezim Orde Baru pun menempatkan militer sebagai pihak yang paling tinggi dalam piramida kekuasaannya. Hal ini disebabkan bahwa militerlah yang dianggap mampu merealisasikan semua gagasan mengenai persatuan itu. Apalagi dalam organisasi militer juga terdapat suatu aturan main (*rules of the game*) yang cukup ketat yang mengandaikan adanya komando yang bergerak berdasarkan hierarki kepangkatan.

Dengan struktur hierarkis gaya militeristis inilah, negara Orde Baru mencoba secara koersif mewujudkan gagasan mengenai persatuan untuk mereduksi seluruh kemajemukan kultural dan ekonomi-politik masyarakat. Proses pendudukan militer dalam struktur kekuasaan pun dijalankan menyerupai strategi aristokrasi masa feodal, yaitu dengan sebutan kemanunggalan militer dengan rakyat. Idiom semacam ini memberikan pemikiran yang sangat ideologis bahwa militer merupakan pihak yang mempunyai superioritas kekuasaan dan pengetahuan yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Sementara itu, sebaliknya, rakyat serta kalangan politisi sipil adalah ornamen-ornamen negara

yang sekadar sebagai bagian yang inferioritasnya sangat tinggi. Dampak atau *impact* yang tidak dapat dihindarkan dari *episteme* ini adalah terjadinya militerisasi terhadap seluruh bagian dari negara-masyarakat. Masyarakat telah dianggap sebagai bagian dari dan bahkan organ yang telah menyatu secara integral dengan korps militer, sehingga mereka pun harus mematuhi segenap komando yang telah diciptakan negara. Jika mereka tidak tunduk dalam aturan main militer ini, maka negara pun melakukan proses eksklusi yang menempatkan masyarakat sebagai telah melakukan tindakan desersi.

Gejala ini menunjukkan bahwa militer dalam pelebagaan kekuasaan negara sengaja menampilkan dirinya secara eksklusif untuk melakukan pembedaan (*differentiating*) dan ingin dibedakan (*differentiated*). Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan berbagai hak istimewa (*privelese*) yang tidak gampang diperoleh oleh setiap orang dalam masyarakat. Substansi persoalan inilah yang sebenarnya layak untuk dibahas, karena sesungguhnya kedudukan istimewa militer dalam negara merupakan pokok dari problema utama jika *civil society* ingin dibicarakan secara lebih mendalam. Jadi, secara konklusif dapat diberikan pendasaran berpikir mengapa *civil society* tidak pernah boleh diperbincangkan secara dualistik dengan *state*, sebab militerlah yang sesungguhnya berkuasa atas negara. Namun, seiring dengan itu, militer agaknya enggan kalau dikatakan serakah sebagai pihak yang mempunyai kehendak untuk melakukan dominasi terhadap masyarakat.

Apabila diadakan pelacakan secara lebih kritis mengapa militer selalu ingin berkuasa atas politik modern, namun serentak dengan itu juga mempunyai perasaan enggan serta bahkan malu, untuk menunjukkan kuasanya yang berlebihan itu, dapat dikemukakan dengan alasan yang bersifat esensial. Ambiguitas keinginan untuk berkuasa dari pihak militer ini (yakni antara perasaan malu serta nafsu untuk melakukan dominasi terhadap masyarakat), justru semakin mendorong militer untuk melakukan penguasaan secara absolut. Hal ini dijalankan melalui berbagai alasan atau cara, yaitu:

*Pertama*, penciptaan berbagai *device* untuk menunjukkan alibi yang mempunyai nuansa kental historisitas. Alibi ini ditunjukkan dengan menyatakan secara tegas serta penuh keyakinan bahwa militer pun mempunyai hak untuk melakukan penguasaan terhadap tatanan negara. Alibi yang paling sering dikemukakan militer adalah bahwa mereka lahir dari rahim rakyat serta berjuang bersama-sama dengan rakyat untuk melakukan pengusiran terhadap kolonialis. Inilah yang disebut sebagai alibi yang mempunyai muatan historis. Dengan alibi semacam ini, militer melakukan suatu percobaan untuk melakukan perpaduan antara sejarah masa lalu dengan tantangan pada masa sekarang ini. Dapat dikemukakan bahwa alibi semacam ini merupakan suatu wujud sinkronisme untuk menghapus anakronisme sejarah yang kemungkinan besar tetap dituduhkan kepadanya.

*Kedua*, adalah penggunaan paradigma profesionalitas. Alfred Stephan dan Samuel Huntington mencoba memberikan perbandingan antara “profesionalisme baru” serta “profesionalisme lama” yang secara empiris pernah dijalankan kalangan militer dalam menjalankan negara. Profesionalisme lama yang dimiliki militer terutama hanya berkepentingan dengan masalah keamanan dalam menghadapi musuh yang berasal dari luar negara (eksternal). Sebaliknya, profesionalisme baru mengarah pada keamanan dalam negeri, khususnya yang mempunyai relevansi dalam menjalankan proses pembangunan. Bekal paling utama yang dimiliki kalangan militer dalam hal profesionalitas ini adalah keunggulan dalam organisasinya yang berlandaskan pada sistem komando dengan berbagai karakteristiknya yang menonjol, yaitu sentralisasi kekuasaan, pembagian wewenang yang dioperasionalkan secara hierarkis, memiliki disiplin yang tinggi, menggunakan sistem komunikasi yang

husus serta mempunyai *esprit de corps* atau semangat kelompok yang tinggi (dalam Rahardjo, 1981: 117).

*Ketiga*, kegagalan pemerintahan yang dipegang oleh kalangan politisi sipil dalam menjalankan kekuasaan negara. Militer melihat bahwa para politisi sipil tidak mampu untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat, baik konflik yang bersifat horisontal karena terjadinya etnosentrisme yang sedemikian tajam dalam masyarakat maupun konflik yang diakibatkan oleh persoalan kelas sebagai akibat kesenjangan pendapatan secara ekonomis. Kalangan politis sipil yang biasanya bermunculan dari berbagai unsur dari masyarakat yang bersifat primordial, seperti agama, ras, golongan, atau juga ideologi, dalam melakukan pengelolaan terhadap negara tidak berhasil mencapai permufakatan. Apalagi spirit politisi sipil adalah keinginan untuk melakukan perdebatan hingga memakan waktu yang sedemikian lama. Proses yang sedemikian, tentu saja, menyita waktu yang sangat panjang.

Sementara di tingkat elite, kalangan politisi sipil dianggap hanya membawa aspirasi dari golongan-golongannya sendiri, di tingkat akar rumput (*grassroots*) terjadi berbagai pertikaian yang tidak dapat diselesaikan. Keberlarutan dalam penyelesaian konflik politik dalam suasana masyarakat majemuk ini dianggap oleh kalangan elite militer sebagai kegagalan total dan ketidakmampuan politisi sipil dalam menjalankan kekuasaan negara. Di sinilah kemudian militer muncul sebagai pihak yang mempunyai topeng sebagai kekuatan politik yang tidak memihak golongan primordial tertentu. Misi yang dilakukannya adalah melakukan penyelamatan (*salvation*) dari masyarakat yang sudah mengalami keremukan akibat konflik, melalui gagasan tunggalnya yang sedemikian monolitik: stabilisasi serta penyatuan semua unsur dalam masyarakat.

*Keempat*, kekhawatiran dari pihak militer bahwa jika mereka tidak melakukan penguasaan terhadap negara, maka diandaikan mereka tidak akan mendapatkan anggaran (jatah) untuk membiayai semua kepentingan mereka. Pihak pemerintah yang sedang berkuasa pun, sekalipun yang sedang berkuasa tersebut adalah pihak sipil, akan memberikan semua tuntutan pihak militer dalam persoalan anggaran negara tersebut. Sebab, aparatus negara di bidang represif ini dinilai masih mutlak untuk diperlukan peranan-peranannya dengan dalih tertentu yang dianggap masuk akal, misalnya saja dengan rasionalisasi seperti alasan keamanan dalam negeri dan juga ancaman dari negara lain. Untuk memperkokoh barisan kekuatan militer ini, negara pun menyediakan anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan berbagai sektor yang sebenarnya juga mempunyai urgensi yang tinggi, sebagai contoh adalah sektor pendidikan.

Maka tidaklah mengagetkan jika dibandingkan pegawai negara yang lain, yaitu kalangan pegawai negara yang berstatus sipil, pihak militer mendapatkan penjatahan yang jauh lebih dari sekadar istimewa. Kemampuan fisik (tubuh) serta mental mereka mendapatkan perhatian yang jauh lebih serius dari pihak negara dibandingkan pegawai negara yang berstatus sipil yang dianggap tidak mempunyai tuntutan yang sejenis. Ini belum lagi peralatan dalam wujud persenjataan serta berbagai pelatihan perang, yang pasti akan menyedot anggaran negara yang tidak sedikit nilainya. Inilah yang lebih tepat disebut sebagai “kecemburuan anggaran” yang pasti akan dikabulkan oleh pihak negara seberapa pun gradasi dari “rasa iri” tersebut. Namun, yang harus dipertanyakan secara sangat kritis adalah: Apakah memang personel militer ini dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tuntutan masyarakat serta kehendak dan semangat zaman yang melingkupinya?

Tentu saja, implikasi mendalam yang harus diterima pada saat menciptakan sebuah kekuatan *civil society* yang benar-benar tangguh tidaklah mudah untuk dicapai. Negara yang sudah sekian lama dibentuk dalam sebuah *episteme* monolitik militerisme akan mempunyai imbas yang lebih mengandalkan kekerasan ketimbang cara-cara rasional untuk menyelesaikan sebuah persoalan, baik dengan cara perdebatan yang terbuka maupun melalui berbagai kompromi yang memperlihatkan semangat *non-violence* (anti-kekerasan). Implikasi ini tidak sekadar menghinggapi kalangan penguasa yang telah sekian lama diuntungkan dengan metode kekerasan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menciptakan stabilitas yang seolah-olah tidak dapat digoyahkan. Namun, yang lebih prinsip lagi adalah pengaruhnya yang sedemikian hegemonik mendorong kalangan masyarakat pun menerima berbagai metode yang selama ini telah diaplikasikan oleh kalangan militer. Hal ini dengan merujuk pada sejumlah alasan, yakni:

*Pertama*, munculnya militer sebagai pihak yang berkuasa atas segala tatanan hidup negara serta sekaligus juga paradigma dan wacana yang berkembang dalam *civil society*, merupakan fenomena *praetorianisme*, yaitu suatu pemerintahan yang dikuasai oleh kalangan petinggi militer. Atau menurut Huntington, sebagaimana dikutip Abdullah (1980: 4-5), *praetorianisme* merupakan suatu keadaan pada saat pengawal telah memposisikan dirinya di kursi dari pihak yang dikawalinya. Fenomena penggeseran secara paksa dari pihak yang seharusnya mengawal menempati singgasana dari pihak yang harus dikawalinya ini pun menciptakan proses institusionalisasi yang berkepanjangan. Yaitu, ketika semua gerak dinamika masyarakat yang sedemikian dialektis harus dipahami secara rigid dengan bentuk-bentuk *security approach* (pendekatan keamanan), yang terbukti secara empiris gagal total dilaksanakan rezim Orde Baru untuk menciptakan stabilitas dalam masyarakat. Kekuasaan dengan penonjolan karakter *praetorianisme* ini selalu melihat negara dalam kondisi yang serba terancam. Harus dipahami dengan benar karena mentalitas militer adalah sebagai pengaman dari penguasa, maka segala bentuk dialektika masyarakat yang mustahil untuk dihindarkan pun selalu harus dicurigai karena akan mengancam keamanan negara.

*Kedua*, karena militer adalah aparatus negara represif yang harus mempergunakan cara-cara kekerasan yang cenderung brutal dan tidak memperhitungkan sedikit pun aspek kemanusiaan, budaya kekerasan pun diterima dan bahkan didogmakan sebagai jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan semua persoalan. Apalagi dari pihak militer itu sendiri sengaja menciptakan secara sistematis bahwa negara haruslah ditakuti, bukannya sekadar disegani atau dihormati. Atau, kalau dibalik, negara dengan aparatus militernya memaksa *civil society* untuk mempunyai penghormatan serta perasaan segan adalah dengan menerapkan metode kekerasan yang melahirkan ketakutan yang mencekam. Inilah keberhasilan rezim Orde Baru yang selama ini menonjolkan wataknya sebagai negara yang tidak memerlukan legitimasi moral. Karena, negara dengan semangat yang sedemikian tinggi menerapkan paradigma Machiavellian untuk menciptakan sebuah lembaga kekuasaan yang oleh Hobbes dianjurkan sebagai Leviathan (dalam Magnis-Suseno, 1995: 1-13). Kesuksesan rezim Orde Baru sebagai perwujudan dari negara yang bermetamorfosis sebagai Leviathan ini ditunjukkan oleh kemampuannya dalam mengatur ketakutan masyarakat. Sehingga, masyarakat pun dengan kemencekamannya yang sedemikian mendalam ini, dapat tunduk pada negara secara mekanis sebagaimana jarum arloji yang berputar secara otomatis.

*Ketiga*, semakin kokohnya kultur feodalisme dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai

tatanan pasca-aristokrasi. Gejala ini memberikan sebuah penegasan bahwa kehadiran militer tidak hanya dapat dipahami secara struktural sebagai hasil pertarungan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Namun, yang justru memberikan artikulasi lebih dominan dalam kasus rezim Orde Baru adalah nuansa kulturalnya. Peter Britton, sebagaimana pernah dikutip Nasikun dan Purwantoro (1999: 42-43), menyatakan bahwa ideologi militer di Indonesia, dalam kaitan ini adalah Angkatan Darat, merupakan suatu hasil integrasi yang sedemikian kuat antara sejumlah aspek profesionalisme yang berasalkan dari Barat. Serta yang lebih utama adalah citra, sikap, dan kewajiban keksatriaan yang bersumber dalam kebudayaan Jawa.

Memang, harus diakui dalam kultur Jawa tidak dikenal adanya dikotomi antara penguasa atau pihak yang memerintah dengan yang menjaga keamanan. Kedua bidang tersebut dipegang dalam satu kendali yang terwujud dalam sosok ksatria. Selanjutnya, sebagaimana pernah dikemukakan Onghokham (1980: 30), untuk menampilkan sosok ksatria tersebut sebagai pihak yang mempunyai kewibawaan tinggi diciptakanlah berbagai mitos mengenai senjata-senjata pusaka yang mempunyai kemampuan. Sedangkan para petani sengaja diperlucuti persenjataannya, sehingga dipakailah ani-ani untuk memanen padi. Jadi, ani-ani tidak sekadar digunakan untuk memperkuat kegotong-royongan, namun merupakan upaya dari pihak kerajaan untuk menutup peluang bagi petani untuk melakukan perlawanan dengan persenjataan yang mengancam kekuasaan kalangan ksatria kerajaan.

Kalau diamati sampai sekarang ini proses perlucutan senjata terhadap kalangan masyarakat pun masih dijalankan, misalnya saja melalui berbagai operasi. Tidak hanya monopoli pemakaian senjata yang dilakukan militer untuk memperkokoh wibawa kekuasaannya. Namun, berbagai atribut serta kostum yang dipakai militer pun dilarang untuk dikenakan oleh masyarakat awam. Hanya saja yang mengalami pergeseran adalah proses penciptaan mitos melalui senjata berubah. Sebab, persenjataan militer lebih dapat dikenali dengan penggunaan rasio. Mitologisasi diciptakan dengan begitu rapinya dalam figur setiap prajurit serta dalam seluruh kelembagaan militer sebagai pihak yang mampu mengayomi seluruh masyarakat dan menjaga stabilitas negara.

*Keempat*, proses maskulinisasi terhadap lembaga negara sebagai penguasa yang harus menonjolkan citra kejantanan dan keperkasaan, sedangkan *civil society* merupakan figur feminin yang sangat lemah dan tidak mempunyai daya sedikit pun. Sehingga dalam kontinum problematika berikutnya, mengalirlah wacana *machismo* yang watak khasnya adalah otoriter, penggunaan kekerasan secara fisik (mengandalkan tubuh), serta semakin mapannya kultur patriarki (Mundayat, 1999: 58-73). Jika negara telah mempunyai sifat bawaan sebagai profil yang sedemikian maskulin, maka semua wacana yang terbentuk di belakangnya adalah menempatkan sosok perempuan secara sekunder sebagai *the Other* (yang Lain). Ini sebagai akibat bahwa negara sebagai pihak yang mempunyai citra kelelakian akan selalu tetap menjaganya dengan strategi hierarki oposisi-biner, yakni melalui metode yang cukup rapid dengan menempatkan perempuan sekadar sebagai penghibur dan alat pemuas bagi dorongan-dorongan libidinal lelaki. Selain itu juga dengan penerapan yang ketat melalui dikotomisasi bahwa negara adalah lelaki yang mempunyai watak jantan-perkasa-rasional. Sementara *civil society* adalah sekadar profil dari perempuan yang bernuansakan betina-lemah-emosional. Model-model kekerasan pun dianggap sebagai sebuah kewajiban untuk memperlihatkan *image* tentang ke-“macho”-an. Sedangkan kultur yang mengandalkan perdebatan dan kelemahlembutan dianggap terlalu lamban dan sangat bertele-tele dalam menyelesaikan setiap persoalan.



### C. Penutup

Kalau sekarang ini bermunculan optimisme akan datangnya sebuah *civil society* yang ditandai oleh akan ditariknya secara gradual dwi fungsi (dalam bidang sosial-politik serta pertahanan-kemanan) yang dijalankan militer, sebenarnya, persoalannya tidaklah sekadar masalah perimbangan kekuasaan (*balance of power*) antara kalangan politisi sipil dengan pihak militer. Namun, yang lebih krusial adalah berkaitan dengan problematika budaya politik yang akan berpengaruh cukup mendalam dalam pemikiran dan tingkah laku masyarakat secara keseluruhan (Kleden, 1999: 45-62). Artinya adalah yang paling prinsip dari kesemua persoalan pemberdayaan *civil society* adalah *lifeworld* yang terdapat dalam masyarakat yang sangat dirasuki *sindrom praetorianisme*, yaitu sehimpunan atau kumpulan dari tanda-tanda penyakit yang mendorong dijalankannya pola-pola kekerasan karena sudah terlanjur dihindangi perasaan curiga sebagai akibat selalu merasa terancam. Mengapa dapat terjadi demikian?

Sebagaimana pernah dikemukakan Habermas (dalam Hikam, 1996: 206), apa yang disebut sebagai *lifeworld* merupakan “kesepakatan sosial yang terbentuk dalam tradisi, kebudayaan, bahasa yang dikomunikasikan dalam praktik keseharian dalam komunitas. Ia mencakup khazanah pengetahuan (*stock of knowledge*), sumber keyakinan-keyakinan (*reservoir of convictions*), solidaritas dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki dan digunakan secara otomatis oleh para anggota komunitas”. Dan, perhitungan yang dilakukan dalam dunia kehidupan (*lifeworld*) masyarakat tersebut adalah pilihan yang serba sangat absolut, yaitu antara membunuh-atau-dibunuh serta pilihan yang serba tidak mengenakan namun telah menjadi imperatif (yaitu melenyapkan-atau-dilenyapkan) dalam menghadapi berbagai konflik atau sekadar perbedaan pendapat. Kesemua pilihan itu, ironisnya, harus dijalankan secara beringas dengan wujud kekerasan fisik. Mungkinkah di hadapan negara yang sedemikian lemah semenjak masa reformasi pada periode Mei 1998 hingga pasca Pemilihan Umum 1999 ini, akan terlihat sedemikian pesimismenya sebuah pemanggungan politik yang dijalankan *civil society* dengan dilatarbelakangi oleh berbagai kemeriahan pesta kekerasan?

## KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Taufik (1980): “Sipil Militer di Dunia Ketiga: Sebuah Raksonomi Pengantar,” *Prisma*, Desember.
- Bertens, K (1985): *Filsafat Barat Abad XX: Jilid II Perancis*, Jakarta: Gramedia.
- Budiman, Arief (1982): “Bentuk Negara dan Pemerataan Hasil-Hasil Pembangunan,” *Prisma*, Juli.
- Hadiwinata, Bob S. (1999): “Masyarakat Sipil Indonesia: Sejarah, Kelangsungan, dan Transformasinya,” *Wacana*, No. 1.
- Hikam, Muhamad A.S. (1996): *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES.
- Kleden, Ignas (1999): “Dwi Fungsi ABRI: Kesatuan Bangsa dan Kemajemukan Budaya,” *Driyarkara*, No. 4.
- Magnis-Suseno, Franz (1993): *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius.

\_\_\_\_\_, (1995): *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia.

Mundayat, Aris Arief (1999): “Militerisme dan Budaya Machismo.” *Unisia*, No. 38.

Nasikun dan Bambang Purwanto (1999): “Redefinisi Peran ABRI di dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Sipil,” *Unisia*, No. 38.

Onghokham (1980): “Kedudukan Politik Kaum Militer dalam Sejarah,” *Prisma*, Desember.

Rahardjo, M. Dawam (1981): “Angkatan Bersenjata sebagai Kekuatan Politik,” *Prisma*, Desember.